

RANCANGAN

RISALAH

RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2018.
Waktu : Pukul 10.15 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat : H. Desmond J Mahesa, SH.,M.H /Wkl Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, SH, M.Si/Kabag Set. Komisi III DPR RI.

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

KETUA RAPAT (H. DESMON JUNAIDI M. SH., MH./F-GERINDRA):

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Yang saya hormati Bapak-Bapak Anggota Komisi III DPR RI,
Ketua Komisi Pak Kahar Muzakir,
Yang saya hormati Pak Pras Jaksa Agung, Pak Jambin dan jajaran
Kejaksaan Agung yang hadir hari ini.

Ini rapat anggaran hari ini ada beberapa hal yang tentunya ingin kami tahu. Yang pertama adalah apa yang telah terjadi atau berjalan di APBN 2018 yang lalu. Ini bulan ke sekian berarti penyerapannya sudah berapa, bulan selanjutnya berapa agar ini jadi acuan awal untuk bikin catatan-catatan kita dalam rangka memutuskan kekurangan-kekurangan dari keinginan usulan Kejaksaan Agung terhadap anggaran yang diperlukan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Ketua, ketua. Izin ketua, belum dapat bahan karena kemarin bahan yang dikasihkan diminta kembali, kita belum pegang apa-apa. Kemarin dibagikan tapi katanya salah, ditarik kembali jadi sekarang belum ada lagi.

KETUA RAPAT:

Oh ini maaf Pak Ichsan ini kesalahan berada di panitia pelaksana ini.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Oke terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sekretariat, sekretariat. Saya juga baru dapat. Jadi anggaran 2018 ada gambaran tentang persoalan-persoalan anggaran 2018. Selanjutnya juga hal-hal yang perlu digambarkan problem-problem dari kekurangan anggaran yang diusulkan oleh Kejaksaan dan ditanggapi oleh pemerintah. Mengingat Pasal 98 Ayat 2 butir C bahwa penetapan anggaran menurut Undang-undang MD3 adalah di DPR dalam hal ini adalah Komisi III tentunya segala informasi dari Kejaksaan Agung ini bagian dari catatan penting Komisi III memperjuangkan di DPR ini. Tentunya dengan kondisi keuangan yang kita lihat, dilihat itu kapan 16 Agustus pada saat nota keuangan Presiden Republik Indonesia. Ini pengantar kami di Pimpinan Komisi III dalam rapat hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Jaksa Agung untuk memberi catatan-catatan kira-kira apa saja yang harus disampaikan agar Bapak Ibu Anggota Komisi III hari ini bikin catatan. Saya buka rapat ini terbuka untuk umum.

(KETOK PALU SATU KALI)

Silakan Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI (DRS.HM.PRASETYO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang sangat kita hormati Pimpinan Komisi III Pak Kahar Muzakir.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat Kerja hari ini Pak Desmon Mahesa, dan tentunya segenap Anggota Komisi III yang saya cintai dan banggakan serta segenap awak media yang hadir pada hari ini.

Sebagaimana biasa kami didampingi oleh para Jaksa Agung Muda. Hanya mohon izin untuk Wakil Jaksa Agung sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, begitupun Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara juga demikian. Pertama tentunya marilah kita mensyukuri kesehatan dan kesempatan yang dikaruniakan kepada kita sekalian bahwa pada hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam acara rapat kerja membahas masalah rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan rencana kerja pemerintah tahun 2019 dan beberapa hal catatan-catatan khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran 2018. Berikutnya kami juga mewakili institusi kejaksaan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi segenap Anggota Dewan Komisi III yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1439 Hijriyah ini. Ini sekarang menginjak hari-hari sepuluh ke dua yang penuh dengan ampunan. Sepuluh ke tiga, masuk sepuluh ke tiga iya, bukannya mau meninggalkan sepuluh ke tiga, meninggalkan sepuluh ke dua. Ya tentunya kita harapkan dengan puasa yang kita lakukan selama ini akan semakin menebalkan keimanan kita meneguhkan semangat kita hanya untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara ini. Kami juga perlu melaporkan bahwa kemarin tanggal 4 Juni 2018 bersama-sama Presiden,

Wapres, Pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara dan seluruh jajaran kabinet Pimpinan lembaga kami diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan 2017. Tentunya ini merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu yang sangat kami harapkan untuk menguji mengetahui hasil audit BPK tentang pengelolaan anggaran oleh antara lain Kejaksaan. Dan *Alhamdulillah* saya ingin melaporkan disini Insya Allah dari hasil audit BPK untuk tahun 2016 yang lalu eh tujuh belas yang lalu Kejaksaan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Ini tentunya merupakan satu hasil kerja bersama jajaran Kejaksaan. Disamping merupakan sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi juga tentunya ini memperlihatkan bahwa kami sungguh-sungguh memperhatikan pengelolaan anggaran dilihat dari sisi ketertibannya, kesungguhannya, transparansi dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan keuangan yang berasal dari rakyat ini. Karena dengan demikian secara langsung tentunya Kejaksaan telah berhasil memberikan kontribusi dan andil jajaran Kejaksaan sehingga pemerintah pusat sejak dua tahun berturut-turut mendapat penilaian WTP juga. Dan ingin saya laporkan juga bahwa dari tahun ke tahun secara kumulatif pemerintah pusatpun mendapatkan penilaian WTP ini dengan mengalami kemajuan-kemajuan, dimana kalau boleh saya sampaikan bahwa di tahun 2016 kementerian lembaga yang mendapatkan penilaian WTP sebanyak 74, sementara di 2017 ini 80, jadi naik enam. Sedangkan yang WDP dari 2016 delapan sekarang berkurang menjadi enam. Sementara yang disclaimer dari semula di 2016 enam sekarang tinggal sisa dua lagi. Dan ada semacam harapan dari Presiden untuk meneguhkan tekad pada saatnya nanti diharapkan semua kementerian/lembaga akan mendapatkan penilaian WTP. Khusus pengelolaan anggaran di Kejaksaan sejak awal memang saya tekankan Pak Ketua bahwa kita tidak sekedar mengejar serapan anggaran tapi juga setiap rupiah anggaran uang rakyat harus dikelola dan dipergunakan dengan baik benar dan dapat dipertanggungjawabkan bebas dari penyimpangan-penyimpangan. Dan Insya Allah dengan demikian sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia akan mampu menjadi contoh dalam mengelola uang rakyat. Dan ini tentunya demi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam penegakan hukum yang tentunya dari tahun ke tahun harus dapat ditingkatkan.

Berikutnya saya akan masuk ke hal yang sedang dibahas pada hari ini adalah rencana kerja anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan rencana kerja pemerintah tahun 2019. Ingin saya sampaikan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki enam satuan kerja di Kejaksaan Agung, 31 satuan kerja di Kejaksaan Tinggi, 486 satuan kerja di Kejari dan Capjari dan 3 satuan kerja di luar negeri yaitu di Atase Kejaksaan di Hongkong, Riyadh dan Bangkok. Dengan demikian meskipun Jaksa Agung adalah pejabat penanggung jawab pengguna anggaran, namun hari-hari secara real lebih banyak diurus dan diatur oleh Jaksa Agung Muda Pembina sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai instrument satuan kerja pendukung di lingkungan Kejaksaan. Dari saat perencanaan, perumusan dan penganggaran setelah dibahas bersama-sama dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan selanjutnya hasilnya diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas, dilanjutkan dibahas dalam trilateral meeting, dan terakhir dibahas oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk disyahkan. Jadi dengan demikian atas izin Pimpinan rapat kerja dan segenap Anggota Komisi III disampaikan bahwa Jambin yang sebenarnya sangat memahami dan mengetahui menguasai masalah anggaran dan pagu anggaran di lingkungan Kejaksaan dari sejak perincian awal kebutuhan anggaran, rincian kebutuhan anggaran, rincian jenis belanja

kejaksaan, rincian anggaran per program, rincian proyek prioritas nasional, rincian prioritas bidang pagu indikatif dan sampai dengan permintaan tambahan anggaran kalau terjadi kekurangan. Karenanya dalam Raker berkenaan pembahasan tentang rencana kerja anggaran kejaksaan dan rencana kerja pemerintah tahun 2019 ini untuk selanjutnya Jambin yang nantinya mohon izin untuk dapat memberikan penyajian dan penjelasan secara lebih rinci dan lebih konperhensif. Namun demikian secara garis besar saya akan menyampaikan beberapa hal tentang RKA KL kejaksaan 2019 sebagai berikut. Usulan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2019 dan RKP tahun 2019. Pada tanggal 5 Januari 2018 kejaksaan mengajukan usulan kebutuhan anggaran 2019 sebesar Rp.9.572.549.684.000,-. Pada tanggal 7 Maret 2018 kembali kejaksaan mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran 2019 sebesar Rp.194.629.184.000,- sehingga total usulannya menjadi Rp.9.767.178.868.000,-. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk digunakan membiayai delapan program, berkaitan antara lain belanja pegawai, belanja barang, kegiatan operasional inteligent pidana umum pidana khusus, pengawasan dan perdata tata usaha negara selaku Jaksa Pengadilan Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pagu indikatif kejaksaan tahun 2019 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas ternyata Kejaksaan Agung Republik Indonesia hanya mendapat pagu indikatif sebesar Rp.6.146.221.862.000,- sehingga dibanding pagu indikatif tahun 2018 justru mengalami penurunan sebesar Rp.240.330.693.000,-. Penurunan pagu indikatif tahun anggaran 2019 ini tentunya mempengaruhi penyusunan anggaran untuk membiayai pelaksanaan delapan program yang telah disusun sebelumnya. Dan tentunya mempengaruhi juga penyusunan anggaran untuk melaksanakan Tupoksi kejaksaan dibidang penanganan perkara Pidun, Pidsus juga Datun. Pada tanggal 14 Mei 2018 dilaksanakan kembali trilateral meting antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Bappenas. Kami menyampaikan pagu indikatif kejaksaan 2019 yang besarnya Rp.6.146.221.982.000,- jauh dari mencukupi dari kebutuhan yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan real guna membiayai seluruh program yang sudah disusun oleh kejaksaan, termasuk dan terutama berkaitan dengan belanja operasional pegawai. Dengan adanya kenaikan grade tunjangan kinerja remunerasi sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal ... September 2018. Dari persetujuan perubahan evaluasi jabatan. Jadi kalau dulu Pak Ketua saya ingin sampaikan bahwa di lingkungan kami dikenal ada satuan tugas teknis dan satuan tugas pendukung. Satuan tugas pendukung antara lain adalah pembinaan, pengawasan dan Datun. Sementara satuan tugas teknis adalah Intel, Pidsus dan Pidum. Dari dua katagori satuan tugas ini gradenya berbeda-beda, sementara beban tugasnya sebenarnya sama sehingga seringkali menimbulkan rasa jeles terhadap teman-teman yang masih sedang melaksanakan tugas satuan tugas pendukung, sehingga pada akhirnya atas pembicaraan kami dengan Menteri PAN RB akhirnya disetujui bahwa semuanya disamakan. Nah ini juga yang membuat konsekwensi kurangnya apa itu anggaran khususnya untuk belanja pegawai. Kemudian disamping itu dibahas juga mengenai dalam trilateral meting tentang proyek prioritas nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 dan proyek prioritas bidang Kejaksaan Republik Indonesia yang juga akan dilaksanakan di 2019. Disini ada perbedaan antara RKP dengan RKA KL kejaksaan, dimana dalam RKP ditentukan hanya sebanyak empat program, sementara untuk yang diajukan oleh bidang eh prioritas bidang kejaksaan sebanyak lima program. Prioritas nasional kejaksaan 2019 sebesar Rp.163.331.738.000,-. Sementara prioritas bidang Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan tahun

2019 yang ada lima program meliputi dukungan management dan tugas teknis lain, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, pendidikan pelatihan aparatur, pendidikan pengamanan dan penggalangan Ipoleksosbud hukum dan Hankam serta penyelesaian perkara Pidum. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebenarnya sejumlah Rp.659.839.000.000,-. Disini saya ingin sedikit memberikan penjelasan Pak Pimpinan rapat bahwa kemarin sempat muncul dipemberitaan tentang mempertanyakan apakah benar kejaksan mengajukan usulan untuk membeli senjata. Saya sendiri belum tahu siapa yang membuat pernyataan, mungkin Jamintel yang membuat pernyataan. Saya ingin mengklarifikasi bahwa walaupun itu benar direncanakan itu adalah bagian dari program penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk Ipoleksosbud, hukum dan pertahanan keamanan. Sementara saya juga akan sampaikan permintaan tambahan anggaran. Pada tanggal 9 Mei 2018 Kejaksaan Republik Indonesia berkiriman surat ke Menteri Keuangan minta tambahan anggaran sebesar Rp.3.825.566.050.669,-. Ini yang tentunya nanti perlu dukungan dari Komisi III DPR untuk kiranya Menteri Keuangan bisa memahami tentang kekurangan ini untuk bisa nanti disetujui, karena faktanya memang kami mengalami kekurangan dari pagu indikatif yang telah diputuskan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya sesuai permintaan Pimpinan rapat saya akan menyampaikan tentang pagu alokasi anggaran kejaksan tahun 2018. Di tahun 2018 kami memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp.6.386.605.675.000,-. Sampai dengan awal Juni 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.1.862.724.501.081,- atau setara dengan 29,17 persen. Jadi realisasi anggaran sampai dengan awal bulan Juni ini sebesar 29,17 persen. Di sisi lain kami juga mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp.204.795.066.629,- untuk membiayai beberapa kegiatan mendesak yang belum dapat alokasi anggaran dalam DIPA 2018 antara lain untuk membayar kekurangan belanja pegawai, pengadaan CPNS, pembiayaan Atase Kejaksaan di luar negeri kami sudah sampaikan tadi ada tiga Atase kami nanti akan tambah satu lagi, biaya bimbingan teknis perencanaan untuk tiga puluh satu Kejaksaan Tinggi dan biaya program Diklat tambahan. Kami juga mengajukan permintaan tambahan anggaran tahun 2018 melalui APBNP untuk membiayai beberapa program kegiatan prioritas yang belum terpenuhi. Surat kami kami kirimkan tertanggal 25 Mei 2018 kepada Menteri Keuangan sebesar Rp.2.165.314.747.122,- dan sampai saat ini belum ada keputusan dan jawaban. Untuk itulah dalam kesempatan ini dalam kesempatan yang sangat berharga ini dan penting ini kami mohon dukungan dari Komisi III kiranya permohonan tambahan anggaran melalui APBNP untuk kejaksan di 2018 ini bisa dikabulkan oleh Menteri Keuangan. Lain-lain yang perlu kami sampaikan tentang rendahnya serapan anggaran karena baru 29 persen sampai dengan bulan awal bulan Juni ini adalah karena masih adanya beberapa anggaran yang diblokir, terutama untuk pembangunan gedung kantor sembilan Kejaksaan Negeri baru di daerah pemekaran, antara lain di kampungnya Pak Ketua Komisi III di Ogan Komering, Ogan Ilir Pak sampai sekarang ini belum punya kantor, dan termasuk yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Dan ini tentunya sejalan dengan keputusan pemerintah untuk meratorium pembangunan gedung kantor baru. Namun demikian tentunya didalam kesempatan ini juga kami ingin sampaikan betapa kita sangat memerlukan gedung kantor itu untuk memberikan dukungan kepada jajaran satuan kerja di ujung tombak supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Dari sembilan gedung kantor Kejari yang kami perlukan memang ada dua diantaranya yang dibantu oleh Pemda dan Pemkot, antara lain untuk Kejaksaan Negeri Badung Bali dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sementara Tangerang Selatan juga dibantu oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Permintaan persetujuan pembangunan tujuh

Kejari lainnya yang harus memiliki gedung kantor baru itu sedang kami tunggu dari Presiden dan sudah kami surati. Sekarang sedang kami tunggu keputusannya, kami kemarin sudah melakukan pembicaraan secara khusus dengan melalui Menseskab, dan mereka namanya ada semangat untuk membantu segera terbangunnya ketujuh Gedung Kantor Kejaksaan Negeri baru tadi. Sekali lagi tentunya semua ini memerlukan dukungan dari Komisi III supaya roda pelaksanaan tugas di semua satuan kerja kejaksaan menjadi lebih lancar, dan tentunya ini juga untuk melengkapi unsur pemerintah daerah di penugasan mereka masing-masing. Sementara saya juga ingin laporkan tentang telah turunnya persetujuan untuk pembangunan gedung kantor baru di Kejaksaan Agung yang kami sebut sebagai gedung untuk pusat pengelolaan aset Kejaksaan Republik Indonesia meskipun nanti tentunya tidak semata-mata untuk pusat pengelolaan aset tapi juga untuk bidang-bidang lain. Karena dengan adanya pemekaran dan adanya penambahan struktur organisasi di lingkungan kejaksaan dimana kami mendapatkan ... untuk delapan eselon II A, dan ada turunannya eselon III, eselon IV tentunya memerlukan tambahan ruangan kerja baru. Dan untuk biaya pembangunan ini telah disiapkan dana sebesar Rp.96.560.000.000,- yang ini nanti akan digunakan semaksimal mungkin untuk membangun gedung kantor baru setinggi sepuluh tingkat, dan mungkin ada sisa lebih dari anggaran itu akan digunakan untuk merenovasi gedung utama Kejaksaan Agung. Hanya saja Pak Pimpinan rapat sampai saat ini proyek pembangunan gedung kantor baru untuk PPA itu sendiri belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu *clean and clear* dari BPKP. Kami juga mendapatkan bantuan untuk membangun gedung baru Kantor Kejaksaan Negeri Pakanbaru atas bantuan dari Pemerintah Kota Pakanbaru, dan juga mendapatkan bantuan untuk membangun gedung baru Kantor Kejaksaan Tinggi Riau atas bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dengan anggaran sebesar kurang lebih 96 milyar. Saya ingin sampaikan bahwa kendatipun namanya dan sebutannya itu bantuan tetapi saya sudah perintahkan kepada jajaran dibawah satuan kerja yang bersangkutan untuk tetap harus mengawasi dengan sungguh-sungguh dan ketat, karena bagaimanapun ini adalah juga berkaitan dengan masalah penggunaan uang negara dalam hal ini keuangan daerah. Untuk pembangunan gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau supaya lebih aman dan sih pelaksanaannya kami minta bantuan dari Kementerian BUMN untuk ditunjuk pelaksanaannya dari pihak BUMN dan kepada kami diajukan PT Hutama Karya, jadi Hutama Karya yang mengerjakan pembangunan gedung kantor di Kejaksaan Tinggi Riau.

Kami juga ingin laporkan bahwa dalam situasi dan kondisi anggaran yang katakanlah sangat meped dan cukup minim, namun demikian jajaran kejaksaan *Alkhamdulillah* berhasil menunjukkan kinerjanya dengan menangani perkara Tipikor yang jauh lebih banyak dari instansi penegak hukum lain baik KPK maupun Polri. Sementara saya juga ingin laporkan bahwa penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kejaksaan sampai dengan 31 Mei 2018 ini sudah berhasil memasukan keuangan negara bukan pajak sebesar Rp.587.531.703.269,- dari target yang ditentukan Rp.359.476.552.000,-. Jadi capaiannya baru 31 Mei ini sudah mencapai 163 persen dari target yang ditentukan. Kami laporkan juga bahwa program kami program unggulan kami saat ini dalam kaitannya dengan penegakan hukum, pencegahan yaitu TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Pembangunan) baik pusat maupun daerah saat ini kami kewalahan untuk menerima permintaan pendampingan, dan jumlah proyek strategis nasional yang didampingi oleh kejaksaan TP4 kejaksaan mencapai biaya hampir 900 triliun, dan hasilnya *Alkhamdulillah* cukup maksimal. Jadi proyek strategis nasional yang kami dampingi antara lain pembuatan

jalan tol, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, Bandara termasuk juga pembangunan sarana olahraga untuk kepentingan Asian Games 2018 ini.

Demikianlah Bapak Ketua rapat kerja yang saya hormati selintas gambaran tentang rencana kerja anggaran kementerian/lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2019 serta pagu alokasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018 yang dapat saya sampaikan dalam rapat kerja yang terhormat dan penuh harapan ini. Selebihnya untuk lebih detail dan lengkap serta rincinya mohon izin dapat disampaikan oleh Jambin kalau memang masih diperlukan, dan tentunya mengakhiri penyampaian kami sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Kami akhiri dengan *Wabilahitaufikwalhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan *Ohm Santi Santi Santi Ohm*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kejagung. Ada catatan dari meja Pimpinan. Catatan pertama adalah dari gambaran ini kami mempertanyakan tentang Renstra Kejaksaan Agung dalam konteks di awal pemerintahan Pak Jokowi sebenarnya. Tentunya Renstra itu lima tahunan. Nah ini tergambar dari anggaran harusnya, harusnya adalah tahapan-tahapan dari Renstra itu sejak awal dipahami oleh pemerintah sendiri khususnya Menteri Keuangan dan Bappenas yang hari ini kesan yang didapat adalah apa yang diusulkan oleh kejaksaan itu seolah-olah tidak dihargai sebagai sebuah konsistensi Renstra. Dan ini harusnya adalah juga bagian dari catatan-catatan pemerintah ke kejaksaan apa yang harus dilakukan dalam masa Presiden Pak Jokowi, kan ini harus ada satu gambaran yang konsistensi kalau kita melihat di negara lain. Ini yang tidak melihat satu irama yang sama dari empat tahun ini, ini tahun terakhir di pemerintahan Pak Jokowi. Ini catatan penting bagi kita untuk melihat tingkat prestasi akhirnya kejaksaan, ini catatan yang pertama. Catatan yang ke dua adalah diminta 9,7 disetujui enam, masih ada kekurangan 2,4. Juga ada catatan dari kunjungan Komisi III ke daerah-daerah masukan dari Kejati umumnya pada umumnya membutuhkan peningkatan anggaran. Pertama penanganan perkara Pidsus dan Pidum maupun Datun. Pada saat kami kunjungan ke daerah ya Pidsus, Pidum dan Datun itu merasa bahwa anggarannya kurang. Ini catatan khusus untuk Pak Jambin dan masing-masing Pak Pidsus, Pidum dan Datun. Yang ke dua adalah membangun sistem administrasi yang berbasis IT. Yang ke tiga adalah renofasi perluasan atau pembangunan gedung Kantor Kejaksaan yang tadi digambarkan. Kenapa ini penting kami sampaikan adalah kami ingin melihat wajah mitra kami di daerah itu elegan didalam proses penegakan hukum, itu kan harusnya performannya, pengetahuan dasarnya, kesejahteraannya. Hari ini kita bicara tentang anggaran. Tentunya catatan-catatan selama ini bagi kami adalah catatan-catatan yang mengukur semua hal apa yang dilakukan oleh kejaksaan dalam konteks tugasnya dibidang penuntutan. Catatan-catatan ini sangat penting bagi kami Pak Pras, kenapa, karena ini tahun terakhir pemerintah tentunya kami ingin melihat Pak Pras saudara kami karena apapun kita merasa Pak Pras pernah di Komisi III, pernah sama-sama kita di DPR. Tentunya catatan ini adalah catatan penting bagi kami ingin melihat Pak Pras berprestasi dalam konteks selama memimpin Kejaksaan Agung di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ini catatan dari kami.

Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Anggota, kita mulai mana, mulai semuanya atau per fraksi?. Per fraksi, ya tapi tolong ini masalah anggaran ya bukan pengawasan. Waktunya pendek, kami mulai darimana, tengah lagi. Dari atas yang paling pemenang Pemilu silakan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih ketua. Pak Jaksa Agung beserta jajarannya. Pada prinsipnya karena ini sifatnya baru penyampaian Pak Ketua jadi kami memang melihat ada beberapa program-program dari kejaksaan yang sifatnya sangat dibutuhkan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua adalah kalau kita berkunjung ke daerah-daerah itu memang ada keluhan dari kawan-kawan di daerah bahwa fasilitas mereka untuk melakukan atau menyelesaikan pekerja itu sangat minim sehingga memang saya kira hal-hal seperti perlu perhatian, selain juga memperhatikan pembangunan-pembangunan yang sifatnya terpusat di kota, artinya di Jakarta ini. Jadi mungkin memang ada masalah juga mengajukan sembilan baru disetujui baru dapat dua, karena itu pun bantuan dari pemerintah daerah, sehingga mungkin kita juga akan mendukung agar tujuh ini bisa tujuh lokasi atau tujuh Kajari baru ini bisa dibentuk. Terutama juga Kajari-Kajari yang letaknya di daerah kepulauan. Seperti kami kemarin baru dari daerah Sulawesi Tenggara itu membawa tahanan ataupun menghadiri sidang membawa tahanan itu semua menjadi persoalan tersendiri buat kejaksaan. Jadi mohon hal seperti itu bisa diperhatikan Pak Jaksa Agung, karena memang ada persoalan tersendiri dan dari segala dari semua ini kami tidak melihat ada program ke arah sana. Karena itu seingat saya dari periode yang lalu sudah menjadi komplain dari atau bukan komplainlah keluhan daripada para Jaksa yang bertugas di daerah sana. Kalau tidak salah ini Pak, bahwa dahulu itu ada Helikopter disana Pak ya di Sulawesi Tenggara untuk fasilitas pendukung Kejaksaan Negerinya, karena itu terdiri dari beberapa pulau-pulau besar, dan hanya pengadilannya kalau korupsinya itu hanya ada di Kendari ya. Jadi dari Wakatobi dari mana-mana itu harus dibawanya kesana, sehingga mohon perhatian untuk ini karena kebetulan kami baru dari sana.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (H. JHON KENNEDY AZIS, SH.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Komisi III dan Pimpinan rapat yang saya hormati, dan kawan-kawan Anggota Komisi III yang saya hormati.

Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.

Beberapa kali saya rapat dengan Pak Jaksa Agung yang saya lihat wajahnya Pak Jaksa Agung yang muram itu hari ini. Saya ikut prihatin Pak Jaksa Agung atas konteks anggaran yang sementara ini mendapat persetujuan hanya sebesar 6,1 triliun. Sebanyak 3,6 triliun bedanya dari Kejaksaan Agung yang diharapkan oleh Kejaksaan Agung. Dan kurang dari 240 milyar dari anggaran tahun 2018. Ini memang sepertiganya ya kalau saya hitung-hitung saya otak-atik kalkulator sepertiganya yang tidak dikabulkan. Jadi permohonannya 9,7 triliun yang disetujui Cuma 6,1 triliun untuk sementara ini. Dan 3,6 triliun yang tidak disetujui. Saya

sebagai salah satu Anggota Badan Anggaran di Komisi III mencoba untuk mendalami apa yang Pak Jaksa Agung sampaikan melalui makalah ini. Ada beberapa pertanyaan Pak Jaksa Agung yang saya sampaikan supaya saya juga bisa mensupport apa maunya Kejaksaan Agung nanti dikemudian hari. Pertama adalah sampai sejauh mana kenaikan anggaran sebesar 3,6 triliun itu diperlukan oleh Kejaksaan Agung. Sebab disini ini saya hanya melihat secara globalnya saja memang ada delapan rincian kebutuhan anggaran pada tahun 2019, tetapi urgensinya atau sampai sejauh mana kebutuhan tersebut sampai sepertiganya lebih itu tiga puluh persen lebih yang Pak Jaksa Agung inginkan. Yang ke dua berkaitan dengan hal itu sebagaimana saya sampaikan tadi kenaikan permohonan anggaran sebesar 3,6 triliun tersebut diperuntukan secara rincinya untuk apa saja Pak Jaksa Agung. Dan kalau itu tidak disetujui bagaimana dengan Kejaksaan Agung, kalau itu tidak disetujui. Tadi Pak Jaksa Agung beberapa kali menyampaikan bahwa faktanya sampai saya catat ada dua kali tiga kali saya kalau nda salah Pak Jaksa Agung tadi menyampaikan bahwa faktanya Pak Jaksa Agung mengalami kekurangan-kekurangan anggaran, ya memang sudah disebutkan ini sudah ada kekurangannya itu apa saja Pak Jaksa Agung. Ini mohon juga perinciannya dari Pak Jaksa Agung. Dan memang yang lebih menarik yang perlu suport dari Anggota Komisi III dan DPR pada umumnya yaitu mengenai penambahan Atase di luar negeri itu, karena memang lebih-lebih untuk terhadap negara-negara yang memang TKI kita banyak disitu, itu kan ya itu memang sangat diperlukan Atase-Atase untuk membela Saudara-Saudara kita yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran undang-undang di daerah mereka bekerja. Dan saya ini sangat saya apresiasi Pak Jaksa Agung, dan ini memang kita perlukan ini sebab dalam beberapa kunjungan kita terlebih lagi terhadap negara-negara yang banyak menampung tenaga kerja Indonesia disitu memang sangat diperlukan Atase-Atase dari Kejaksaan Agung yang tugasnya nanti adalah untuk membela atau selaku pengacara negara didalam hal TKI kita itu dalam hal melakukan pelanggaran undang-undang. Seterusnya Pak Jaksa Agung memang betul apa yang disampaikan oleh Pimpinan rapat dan Pak Ichsan tadi dalam beberapa kunjungan kami terlebih lagi terhadap negara-negara perbatasan seperti Papua, eh daerah-daerah maaf daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah kepulauan itu memang diperlukan suatu perhatian lebih dari Kejaksaan Agung terhadap personil-personil Jaksa disitu, baik terhadap operasionalnya tunjangan-tunjangan mungkin saya sependapat kalau seumpamanya bagi kawan-kawan Jaksa yang berada di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah perbatasan itu perlu mungkin suatu tunjangan yang lebih dibandingkan dengan Jaksa-Jaksa yang ada di Jakarta atau di daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Sebab kadang-kadang kasihan kita mereka perlu beberapa jam, beberapa hari untuk naik speedboad untuk bisa sampai di tempat-tempat tertentu yang mereka tuju. Dan itu perlu memang suatu perhatian lebih dari Pak Jaksa Agung terhadap anggota Pak Jaksa Agung yang berada disitu.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi saya mengapresiasi dan juga prihatin terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung.

Wabillahitaufikwalhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (DRS. H. KAHAR MUZAKIR/KETUA KOMISI III DPR RI):

Walaikumsalam. Lanjut, tapi kita ingatkan bahwa kita ngurus angka saja ya, terlalu jauh kita ngomong jangan tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan angka.

Kami persilakan Pak Gerindra, kacamata boleh dipasang di kepala.

F-GERINDRA (DR. IR. SUFMI DASCO AHMAD, SH.,MH.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta jajaran, saya tidak banyak mungkin nanti disambung Pak Wenny Warouw kalau ada. Saya Cuma melihat pada point B untuk peningkatan sarana prasarana aparaturnya pada point delapan dan sembilan. Pada prinsipnya kita setuju namun nanti mungkin karena ini rapatnya terbuka ada beberapa kalau boleh ada sesi khusus dengan Pak Jamintel dengan seizin Pimpinan tentunya kami akan minta waktu berdiskusi. Ya point delapan dan sembilan, ada apa namanya aspirasi dari kawan-kawan Komisi III ini.

Demikian Pak Jaksa Agung mungkin itu saja, Pak Wenny mungkin bisa dilanjutkan.

F-GERINDRA (DRS. WENNY WAROUW):

Ya saya lanjut, terima kasih Pak Dasco sebagai Kapoksi. Pimpinan rapat kami ingin menambahkan.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Wenny, satu orang saja Pak.

F-GERINDRA (DRS. WENNY WAROUW):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Demokrat.

F-PD (IR. MULYADI):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi III DPR RI.

Saudara Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya yang hadir pada pagi hari ini.

Karena kita sekarang menyangkut pembahasan anggaran dimana yang kita bicarakan adalah masih bersifat indikatif, ini masih pagu indikatif ya Pak Jaksa Agung, tapi tidak ada salahnya Pak Jaksa Agung kita sedikit memperbaiki pola penyusunan anggaran kita yang selama ini lebih bersifat normatif Pak. Pengalaman kami memang

selama ini terpaku kepada pembagian secara proporsional per program per Eselon I begitu juga turun kepada direktur dibagi juga secara proporsional. Biasanya pada saat kita melakukan pendalaman RKAKL saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Dasco kan itu bersifat tertutup. Kita bisa melakukan penajaman Pak Jaksa Agung. Jadi tidak harus dilakukan secara proporsional seperti anggaran yang 2018 misalnya. Kalau misalnya ada di suatu program yang dirasakan itu jauh lebih memerlukan anggaran dan prioritas yang lebih tinggi tidak ada salahnya dilakukan penggeseran dari suatu program yang terlihat tidak terlalu prioritas. Pada saat kita Raker kita sampaikan lagi dan melalui persetujuan Komisi III dengan Jaksa Agung itu disampaikan ke Menteri Keuangan. Itu biasanya bisa dilakukan Pak Jaksa Agung. Saya karena baru di Komisi III saya tidak tahu persis kalau kami dulu di tempat lain biasa itu tergantung pengguna anggarannya dimana pengguna anggaran disini adalah Jaksa Agung. Kuasa pengguna anggaran adalah seluruh Eselon I. Kalau sekarang kan di zaman Pak Jokowi namanya apa Pak, *money follow program* ya, ya *money follow the program*. Kalau dulu ada namanya periode yang lalu anggaran berbasis kinerja, miriplah. Sebetulnya disana ingin diterapkan sebuah konsep dimana bagaimana kita melakukan efektifitas dari anggaran Pak. Terjadinya efektifitas anggaran mana diantara program-program atau kegiatan yang dianggap paling prioritas itu bisa diuji. Maka dari itu peran dari Komisi III pada saat pembahasan RKKL per program per Eselon I yang dimana disana Jaksa Agung ngga perlu hadir, disana kita uji Pak dan bisa boleh terjadi penggeseran. Itu disana terlihat mana yang paling prioritas diantara program-program yang diajukan oleh masing-masing Eselon satunya Pak Jaksa Agung. Sehingga nanti dengan keterbatasan anggaran yang ada kita bisa mengefektifkan mengoptimalkan anggaran tersebut sehingga hasilnya pun bisa diharapkan sesuai dengan harapan Pak Jaksa Agung, dimana disampaikan oleh Pimpinan di akhir masa periode pemerintahan nanti Pak Jaksa Agung menjadi salah satu pembantu Presiden yang dianggap berhasil. Itu tentu merupakan harapan kita juga di Komisi III. Kemudian karena ini menyangkut pagu indikatif alangkah baiknya prioritas-prioritas yang menjadi harapan Pak Jaksa Agung agar masuk di nota keuangan tersebut bisa disampaikan juga kepada kami Pak. Memang sebetulnya nota keuangan kan menjadi kewenangan pemerintah walaupun pada saat sekarang memang sudah bagus ya diminta masukan dari DPR sebelum disampaikan nota keuangan pada bulan Agustus nanti. Setelah nota keuangan pun tidak tertutup terjadi pergeseran, itu pun masih bisa walaupun di nota keuangan sudah dibagi per program, tapi tetap terbuka kemungkinan. Tapi alangkah baiknya Pak sebelum nota keuangan itu Pak Jaksa Agung sudah melakukan exercise Pak, karena bagaimana Pak, karena anggarannya terbatas. Ada kurang tadi Pimpinan mengatakan Pak Jhon mengatakan tiga koma sekian triliun ya kurangnya. Dengan kekurangan tiga koma sekian triliun itu Pak Jaksa Agung harus melakukan exercise Pak agar Tupoksi pokoknya itu yang prioritas itu tidak terganggu Pak, kinerjanya itu tidak terganggu Pak. Kan terornya kalau anggaran kurang kinerja itu kan bisa terganggu Pak. Yang kita harapkan dari Komisi III bagaimana dengan anggaran yang pagu indikatif ini dengan asumsi tidak bertambah di nota keuangan nanti kinerja Kejaksaan Agung tidak terganggu. Atau bisa juga diartikan apakah Kejaksaan Agung selama ini berhasil dengan berkurangnya kasus-kasus hukum, tentu dengan berkurangnya kasus-kasus hukum anggaran untuk kasusnya juga tentu akan menurun, apakah itu bisa diartikan seperti itu sehingga terjadi pengurangan sampai dua ratus sekian milyar ya, Pak Jhon ya. Kenapa ini bisa berkurang, kalau kemarin kami lihat Menkumham naik dari sepuluh triliun menjadi sebelas triliun, Kapolri kita belum lihat ini. Sampai saat ini mitra kerja kita yang menurun dari anggaran 2018 ke 2019 adalah Kejaksaan Agung, kenapa ini

bisa terjadi. Ini yang juga perlu disampaikan. Kalau sekiranya itu tidak maksen Pimpinan kita harus sampaikan, ini jangan sampai mengganggu kinerja Kejaksaan Agung dengan berkurangnya anggaran, harusnya kan naik dengan adanya eskalasi dengan adanya inflasi dan lain segala macamnya. Harusnya itu satuan harga satuan per volume itu harusnya kan naik dari tahun ke tahun tapi ini menurun. Dengan program yang sama saja dengan volume yang sama saja harusnya anggarannya naik, kenapa ini bisa menurun. Ini juga harus disampaikan dan ini menjadi perhatian kami juga di Komisi III untuk menyampaikan ke Banggar bahwa mitra kerja kita yang namanya Jaksa Agung jangan sampai terganggu kinerjanya akibat terjadinya penurunan anggaran.

Saya rasa itu saja dulu Pimpinan karena ini masih bersifat umum, kami belum menyampaikan hal-hal yang bersifat detail. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya sebelum putusan MK tentang satuan tiga itu dulu kita lakukan tapi sesudah MK memutuskan prosesnya kita tidak sampai kesana Komisi III memutuskan kita cukup menilai dan operasional kita serahkan kepada mitra kita. Maka dalam konteks ini apa yang disampaikan Pak Mul mungkin Pak Pras juga kaget, karena selama periode sekarang tidak pernah kita bicara yang terlalu detail. Semua kita serahkan ke Kejaksaan ya dalam konteks ini tentunya Pak Jambin sebagai Eselon I pengguna anggaran dalam konteks ini tapi kan tetap penanggung jawab anggarannya adalah institusi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Itu Pak Mul dulu pernah kita detail, putusan itu yang membuat kita ada dua, satu merasa ngga perlu, yang ke dua kita malas dipelototi dengan KPK sebenarnya. Ya kalau mitra di yang lebih teknis di komisi lain yang teknis mungkin itu penting, ya.

F-PD (IR. MULYADI):

Pimpinan. Yang saya maksud Cuma kita kan keputusan MK kan sekarang terprogram. Kalau dulu kan sampai ke per kegiatan. Memang kita ngga membahas kegiatan, Cuma waktu Kejaksaan Agung menyampaikan yang dimintai persetujuan nanti oleh Pimpinan kan melalui tanda tangan Pimpinan adalah anggaran terprogram kan, berapa program Kejaksaan Agung. Kalau dulu kan sebelum MK kan sampai satuan tiga sekarang sudah ngga lagi. Yang saya maksud waktu meminta persetujuan per program Jaksa Agung tentu menyampaikan logikanya kenapa program ini saya ajukan sekian triliun kenapa programnya sekian, itu Pak. Itu usulan saya.

KETUA RAPAT:

Nanti usul ini mungkin di rapat internal, di rapat internal Pak ya bukan disini tempatnya ya. Nanti gampang kok kalau Demokrat tidak setuju ya tolak saja ngga apa-apa Pak. Jadi kita yang biasa saja Pak, nanti rapat internal berubah atau tidak di internal sifatnya.

Selanjutnya kami persilakan PAN. Selanjutnya PKB.

F-PKB (DR.H.M. ANWAR RAHMAN, M.H.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang kami hormati.

Para Anggota Komisi III yang kami cintai.

Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang kami cintai.

Pak Jaksa Agung tadi memaparkan tentang hasil rampasan pengembalian kerugian negara. Tapi saya lihat didalam ini ngga tertera Pak. Apa itu diluar apa bagaimana Pak, kok ngga ada disini Pak yang hasil rincian tentang apa. Oh gambaran saja Pak ya. Jadi saya mohon nanti itu nanti dilampirkan ya hasil pengembalian kerugian negara itu Pak berapa jadi jelas lebih rinci.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Anwar, itu masuk di pengawasan nanti Pak, ini makronya saja Pak, itu di pengawasan Pak.

F-PKB (DR.H.M. ANWAR RAHMAN, M.H.):

Ya. Kemudian yang ke yang selanjutnya Pak. Tanggal 18 Mei 2018 itu Kejaksaan Tinggi, itu ada pengembalian negara kerugian negara dari Samadikun Hartono, itu jumlahnya cukup besar Pak, delapan puluh satu milyar kalau ngga salah ya ngga. Itu dibayar dengan uang cash, itu kami mohon dengan hormat itu tidak dilakukan lagi Pak, karena itu bertentangan dengan program pemerintah tentang pengurangan penggunaan uang kartal Pak, dan itu persepsi publik itu jelek Pak. Wah zaman sekarang sudah zaman digital kok masih pakai uang berkoli-koli kaya begitu itu ada apa dibalik itu, sehingga persepsi kita jelek Pak. Jadi mohon satu lembar saja transfer tunjukan ke publik ke media bahwa ini nominal sekian masuk ke rekening negara kan sudah cukup Pak, gitu kan.

Terima kasih Pak, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Anwar. Itu lebih pada pengawasan Pak Pras, nanti rapat tersendiri itu. Selanjutnya PKS.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR JAMIL, S.Ag., M.Si.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang juga ketua rapat Pak Desmon Mahesa, Pak Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Jambi, Jamintel, Jamwas, Jampidum dan Jampidsus yang kami hormati.

Memang Pak Desmon seperti kata Pak Jaksa Agung tadi bahwa ini adalah sepuluh terakhir bulan Ramadhan Pak. Dan itu biasanya *Idkumminannar*, pembebasan dari api neraka. Dan api itu identik dengan panas Pak. Mudah-mudahan Pimpinan Komisi III mampu membebaskan Anggota dari kepanasan. Dan jadi tadi

kalau Pak Desmon bilang bahwa Pak Jaksa Agung Saudara kita juga, kalau Pimpinan sudah menganggap Saudara apalagi Anggota Pak, lebih dari Saudara Pak. Pertama tentu saya ingin bertanya kepada Jaksa Agung terkait dengan anggaran kejaksaan, bukan ingin membandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan Kepolisian ada perbedaan yang begitu jauh Pak. Kalau tidak salah Kepolisian itu barangkali di angka delapan puluh triliun ya bahkan lebih kurang delapan puluh tiga triliun, artinya dua digit sementara kejaksaan masih satu digit, bahkan turun lagi. Nah kadang saya pribadi barangkali juga teman-teman Bapak Ibu Anggota Komisi III berpikir sama dengan pikiran saya. Minimal kalau kemudian Kepolisian itu delapan puluh ya kejaksaan barangkali dua puluh, tiga puluh kira-kira begitulah. Karena memang kalau kita lihat tugas Jaksa itu lebih berat, ya artinya dalam konteks peradilan pidana ya kejaksaan seorang Jaksa penuntut itu kan dia harus mampu membuktikan tuntutananya. Dia berhadapan dengan terdakwa, dia berhadapan dengan hakim dia berhadapan dengan pengacara, dia berhadapan dengan orang yang menonton peradilan itu dan berhadapan dengan massa lewat informasi-informasi yang disampaikan oleh Koran, media elektronik dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian dia mempertahankan itu. Nah karena itu memang sudah saatnya saya pikir ketika kemudian pemerintah negara memperlihatkan ini. Nah dalam pembahasan-pembahasan anggaran ya tentu saja dilingkungan pemerintah bagaimana ini Pak Jaksa Agung terkait dengan anggaran kejaksaan. Nah karena itu saya ingin menanyakan itu ya idealnya kan kalau tadi itu saya katakan sudah dua digit ya kejaksaan masih satu digit, harapan kita bisa itu karena di lapangan seperti kata Pak Ichsan tadi itu ya terutama di daerah-daerah kepulauan dalam kasus-kasus pidana korupsi, ya apalagi pengadilan Tipikor ada di Ibukota provinsi mereka membawa ya itu kan juga butuh biaya, kadang-kadang tidak ada biaya. Belum lagi kemudian nanti dalam setahun ya satu kejaksaan misalnya dialokasikan tiga perkara, tapi dalam kenyataannya bisa enam, bisa tujuh, bisa delapan, bisa sepuluh. Nah ini darimana belum lagi nanti dalam kasus-kasus pidana umum itu dari Kepolisian masuk terus, masuk, masuk, masuk, masuk. Kalau dibiarkan itu artinya kita mengabaikan keadilan masyarakat, sementara kalau dilaksanakan anggaran terbatas. Oleh karena itu kemudian akhirnya ya Jaksa pandai-pandai kaulah, ya kan pintar-pintar kaulah kaya mana kau ... itu, kira-kira begitu Pak ya. Nah karena itu barangkali Bapak Ibu Anggota Komisi III ya kita perlu memikirkan soal ini sehingga kemudian anggaran kejaksaan bisa lebih mendekati paling tidak sepertiga dari apa yang sudah didapatkan oleh kepolisian meskipun kita sadar bahwa kepolisian itu aparatnya banyak, ya dari Polsek, Polres, Babinkamtibmas dan lain sebagainya. Itu satu hal soal anggaran kejaksaan karena memang ya kita beberapa teman yang sejak periode 2004 sampai sekarang di Komisi III ini memang memperhatikan hal mudah jadi juga kegagalan kami ini meyakinkan pemerintah, itu yang pertama. Yang ke dua ini soal bangunan-bangunan yang masih belum dibangun di 2018, mudah-mudahan Komisi III itu bisa membantu agar ada bangunan-bangunan yang bisa dibangun ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji ... ada tujuh ya satuan kerja yang belum dilaksanakan, karena itu DPR bisa mendorong agar izin Presiden tersebut dapat turun dan pembangunan gedung satuan kerja baru dapat dilaksanakan. Soalnya ada sepuluh salam Pak ya salah satu daerah pemilihan, jadi ada Kejari sepuluh salam yang, memang saya sudah lihat kesana ketika reses tanah sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten setempat, bahkan rumah Kajarinya juga sudah ada sudah terbangun, Cuma gedungnya yang belum ada. Lain-lainnya terkait dengan pengadaan senjata yang disampaikan tadi ya tentu saja barangkali kita sadar bahwa aparat penegak hukum terutama Jaksa masih rentan dengan keselamatan diri mereka

walaupun memang dalam pembentukan Jaksa kan dilatih juga Pak ya beladiri dan lain sebagainya tapi bahwa belum cukup apalagi menghadapi kasus-kasus terorisme. Jadi pengamanan terhadap aparatur Jaksa itu sangat dibutuhkan karenanya senjata memang dibutuhkan tapi barangkali ada penjelasan soal ini ya soal senjata ini ya dan sebagainya sehingga kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian kejaksaan membutuhkan senjata dengan model seperti ini dengan spesifikasi seperti ini karena memang tantangan yang dihadapi ya seperti ini gitu kira-kira Pak.

Barangkali demikian Pak Ketua beberapa hal karena ini seperti yang dikatakan Pak Mulyadi masih indikatif masih ada pembahasan-pembahasan lanjutnya. Dan tentu saja kita untuk sementara bisa menerima apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini yang disampaikan oleh Jaksa Agung terkait dengan anggaran, dan mudah-mudahan kita bisa apa namanya meningkatkan keuangan Kejaksaan Agung.

Terima kasih Ketua, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH.,M.Si.):

Terima kasih ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III yang terhormat.

Yang terhormat Pak Jaksa Agung, para Jam berserta seluruh jajaran.

Sedikit saja yang menjadi ganjalan dan juga pertanyaan tentunya terkait dengan anggaran Kejaksaan Agung ini yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Jaksa Agung. Kami mohon penjelasan Pak karena biasanya ketika anggaran itu turun ada yang karena memang kemampuan fiskal pemerintah secara makro sedang jelek sehingga terjadi proporsionalitas penurunan anggaran di semua atau paling tidak di banyak KL kementerian dan lembaga. Tapi ada juga ya terjadinya penurunan anggaran atau pagu indikatif anggaran itu bukan karena kemampuan financial fiskal pemerintah secara makro itu sedang tidak baik sedang jelek, tapi karena kemampuan penyerapan anggaran KL yang bersangkutan ya pada tahun anggaran sebelumnya, atau dua tiga tahun anggaran sebelumnya atas mata anggaran yang diberikan dalam pagu fixnya. Nah saya ingin bertanya yang mana ini untuk kasus Kejaksaan Agung ini, ya apakah ini semata-mata karena disampaikan dalam pembicaraan trilateral bahwa kondisi fiskal pemerintah itu secara umum akan jelek atau lagi jelek, khususnya untuk 2019 atau karena yang ke dua, ya karena banyaknya penyerapan yang tidak tercapai ya untuk tentu program-program tertentu sehingga oleh Kementerian Keuangan ya sudah dikurangi saja anggarannya. Jadi itu yang kami ingin mendapatkan keterangan sehingga ini tentu bisa kami sampaikan kepada wakil-wakil fraksi kami yang duduk di Banggar nanti pada saatnya.

Terima kasih Pak Ketua itu saja, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya Nasdem.

F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan.

Yang saya hormati Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya.

Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Kejaksaan Agung hasil audit BPK dapat WTP. Yang ke dua sebetulnya hal yang lain ini telah dilakukan dengan apa dengan seksama terhadap hal ini. Dan ada permintaan kepada Komisi III ada sejumlah hal yang misalnya kebutuhan tambahan itu sekitar dua ratus milyar itu maka tentu saja kita akan usahakan. Nah walaupun itu adalah sebetulnya seperti teman-teman katakan tadi masih kecil tetapi secara umum kami sudah dapat memahami hal ini, dan kemudian terhadap permintaan dari Kejaksaan Agung adalah untuk melihat lebih jauh di Banggar nanti. Dalam pembahasan di Banggar kami dari Fraksi Partai Nasdem Insya Allah akan mencoba mengawasi hal tersebut.

Mungkin demikian saja *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Yang terakhir Hanura.

F-HANURA (SARIFUDDIN SUDDING, SH.,MH.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Komisi III, Jaksa Agung beserta jajarannya yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebenarnya tadi sudah dijawab sendiri oleh Pak Desmon ya bahwa di beberapa daerah memang banyak kekurangan anggaran dalam kaitan masalah kejaksaan ini, dan itu adalah hasil temuan kita pada saat melakukan kunjungan ke daerah. Saya melihat bahwa kejaksaan ini tidak hanya dalam penguatan dari sisi anggaran sebenarnya karena ada dua hal yang memang harus dilakukan ya. Di satu sisi sebagai kejaksaan sebagai *criminal justice proces* dan juga sebagai *criminal justice sistem*. Nah dalam konteks sebagai *criminal justice sistem* antara unsur kejaksaan, pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM dan pihak kepolisian saya kira lembaga kejaksaan ini memang lebih rendah ya anggarannya dibanding dengan institusi-institusi yang lain. Kalau lihat dari pagu anggaran pihak kepolisian seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi ya di tahun 2018 kemarin pihak kepolisian 95 triliun. Nah tahun ini juga ya kita belum dapat apa namanya pagu indikatifnya tapi yang satu sisi bahwa kepolisian kejaksaan ini seharusnya tidaklah jauh beda banget ya dari proses penganggarannya karena fungsi dalam kaitan menyangkut masalah proses penegakan hukum ini dilakukan secara bersamaan. Nah untuk itu Pimpinan ya saya sangat berharap bahwa patut kita memberikan dukungan ya terhadap kejaksaan ini,

karena seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyadi tadi ya *money follow the program* saya kira memang dari program-program yang disampaikan oleh pihak kejaksaan ini sangat realistis. Tapi saya juga ada satu sisi Pak Jaksa Agung ya ini kan tahun politik Pak. Saya lihat dari delapan program ini tidak ada program dalam kaitan menyangkut masalah penanganan dalam kaitan menyangkut masalah kasus-kasus pelanggaran Pemilu misalnya. Ini juga harus mempersiapkan program ini karena ini menyangkut masalah tahun politik di tahun 2019. Nah dari delapan program yang diajukan ini saya belum melihat ke arah situ. Nah saya kira ini kan butuh anggaran juga dalam kaitan masalah ini.

Saya kira itu Pak Ketua ya saya kira kita memberikan dukungan dalam kaitan masalah penganggaran di kejaksaan ini karena di satu sisi disamping dalam pelaksanaan *criminal justice proces* juga sebagai *criminal justice sistem* dalam konteks penguatan penegakan hukum.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sudding. Selanjutnya kami persilakan Pak Jaksa Agung, sisa waktu kita tinggal dua puluh menit, jam dua belas. Jadi jam dua belas kita akhiri.

Silakan Pak Pras.

JAKSA AGUNG RI (DRS.HM.PRASETYO):

Terima kasih Pak Pimpinan Rapat Kerja yang saya hormati dan saya banggakan.

Saya akan mencoba menjawab satu per satu pertanyaan yang disampaikan. Pertama tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas atensi dari khususnya Pimpinan Rapat Kerja yang melihat adanya kesenjangan dalam kaitan dengan kesediaan anggaran untuk kejaksaan. Hanya ingin saya sampaikan Pak Desmon bahwa beberapa hari lalu saya sempat ketemu dengan Menteri Keuangan secara informal dia sampaikan setelah melihat tadi bahwa kejaksaan ternyata sejumlah uang yang awalnya oleh mereka dianggap atau dirasa tidak mungkin akan kembali lagi yaitu pembayaran uang pengganti dari Samadikun Hartono, mereka sudah tidak berpikir akan bisa didapatkan kembali tapi dikatakan bahwa kejaksaan ternyata bisa berhasil itu. Dan kalau tadi mengenai masalah uang tunai Pak yang memberikan mereka kita menerima saja daripada nanti, ngga mungkin kita menolak. Beda dengan tempo hari waktu kasus Tol Jor S itu, itu kami transfer sebesar 1,1 triliun ya langsung bisa dilihat disana, Menteri Keuangan ngga melihat. Jadi setelah melihat apa yang kami lakukan Sri Mulyani mengatakan anggarannya sudah saya tambah loh, mudah-mudahan saja nanti Pak. Ya itu menjadi satu realitas kenyataan. Dan bahkan dia menyampaikan ke stafnya untuk supaya kejaksaan juga jangan sampai ada yang tertinggal katanya. Kami harapkan memang itu akan menjadi kenyataan Pak Desmon dan teman-teman yang lain. Dari Fraksi PDIP Pak Ichsan Soelistiyo memang itu betul Pak, keluhan itu juga kami terima termasuk sampai ... khususnya di Indonesia Timur Pak, dan penanganan perkara korupsi karena bagaimanapun perkara korupsi itu sidangnya hanya ibukota provinsi. Katakanlah di

Namre sidangnya di Ambon, begitupun yang di Dobo juga begitu. Pernah ada satu cerita itu alat transportasinya hanya dengan Perahu, dan ketika membawa si tahanan itu ke Ambon kemudian di tengah jalan Jaksanya mabok. Karena mabok terus ditolong oleh si tahanan ini satu hal yang agak lucu, yang terjadi itu tapi betul. Ini peristiwa peristiwa nyata, nah akhirnya ada korelasi hubungan antara Jaksa dengan si tahanan. Tapi itu tidak berarti akan mengurangi nilai dari tuntutan yang kita ajukan. Tentunya dengan penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang bersalah harus dihukum. Kemudian Helikopter jauh dari impian kami Pak, kalau Polisi ya mungkin ya, Jaksa ini jangankan Helikopter kita dapat speedboard sudah bersyukur sebenarnya. Memang kasihan, kasihan untuk kejaksaan. Saya betul kata Pak Nasir Jamil tadi tugas kami sangat berat semuanya, bagaimana harus menghadapi bukan hanya si terdakwa tapi juga pengacara juga hakim kita hadapi. Bayangkan bagaimana hakimpun harus kita berikan keyakinan yang seringkali juga beda pendapat dengan kami. Ini hal fakta yang kita hadapi. Jadi memang disitulah seni seorang Jaksa, tapi bagaimanapun sudah menjadi panggilan tugas kita harus kita lakukan dengan baik. Dari Pak Jhon terima kasih Pak Jhon jadi memang itulah kenyataannya dari 9,7 yang kita ajukan yang disetujui dalam pagu indikatif ... hanya 6,1 turun dari tahun sebelumnya. Nah saya pikir dengan karena masih pagu indikatif inilah kami harapkan dukungan dari Komisi III untuk bagaimana supaya apa yang kami ajukan bisa setidaknya mendekati dari yang kami usulkan. Jadi keinginan tersebut sebenarnya bukan merupakan keinginan Pak tapi kebutuhan Pak. Jadi yang kami ajukan bukan keinginan tapi kebutuhan, dan itu semua sebenarnya kami hitung dengan secara rinci dan detail berdasarkan hasil pertemuan dan pembicaraan dengan semua satuan kerja yang ada. Mengenai penambahan Atase saya pikir terima kasih juga Pak Jhonn untuk dukungannya. Dan ini satu hal yang juga bukan berarti kami narsis atau apa itu memaksakan diri, ini terakhir kemarin ada dua WNI yang TKW kita yang diselamatkan dan disitu yang berperan, mohon maaf Pak Desmon itu adalah Jaksa kita, namanya Muhibuddin ya kebetulan dia orang Aceh ya, dan dapat Hasan Wirayuda Award. Jadi dia betul-betul All Out untuk membela ini membela memberikan advokasi pada ini pada para TKW khususnya di Arab Saudi, dia tugasnya di Riyadh. Hanya sayang mungkin beberapa bulan lagi harus kembali ke induk karena dia akan kita carikan pengganti yang ... Kebetulan yang bersangkutan itu dari Gontor, dari Pondok Pesantren jadi dia sangat paham tentang Arab dan sebagainya. Kita bersyukur punya tenaga seperti itu, tentunya itulah yang dapat kami lakukan untuk dedikasi kita kepada bangsa ini. Perhatian pada mereka yang ditugaskan di perbatasan pedalaman juga tentunya tergantung dari kemampuan kami Pak. Inginnya kami yang memberikan mereka sesuatu perhatian yang lebih tapi ya kembali pada kenyataan kemampuan yang sangat terbatas. Hanya kami mencoba bahwa sekarang sedang menyelenggarakan suatu upaya untuk mendorong kesadaran prestasi mereka bekerja sama dengan Menteri PAN RB untuk memilih diantara Kejari-Kejari di Indonesia yang ada itu menjadi nominasi untuk WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan itu nanti tentunya akan dinilai satu per satu. Termasuk Gianyar Pak, itu termasuk yang dapat proyeksi WBK ini. Pak Dasco terima kasih nanti mohon bisa ditindaklanjuti untuk berbicara secara lebih intens secara tertutup dengan kejaksaan tentang apa yang dikehendaki dan apa yang disarankan apa yang diarahkan sepenuhnya nanti akan kami terima dan akan kami sepakati sebab itu memang sangat bermanfaat untuk kejaksaan. Pak Mulyadi terima kasih atas kesediaan untuk bersama-sama membahas finalisasi anggaran untuk kejaksaan yang memadai, karena sekarang masih bentuknya masih pagu indikatif sehingga masih sangat fleksibel untuk bisa dirubah, dialihkan atau ditambah dan sebagainya. Hanya memang perlu kami sampaikan

bahwa ... Presiden pun tadi disampaikan sekarang adalah prinsipnya *follow the program* dan bahkan *follow the target* ya. Itu untuk nantinya bagaimana supaya anggaran atau alokasi anggaran yang diusulkan itu dan disetujui tidak harus dibagi rata di masing-masing bidang, kalau kami ada enam bidang tapi tentu dilihat kebutuhan real yang mereka perlukan sesuai program kerja yang akan dilaksanakan. Mungkin seperti itu sehingga dengan demikian tidak ada satu bidang yang kelebihan anggaran sementara yang lain kurang. Karena kalau sudah menjadi mata anggaran tetap tentunya agak sulit untuk dialihkan, karena perlu direview oleh BPKP dan sebagainya, direvisi. Terima kasih Pak Mul. Exercise kami lakukan nantinya, mungkin ya perlu arahan dan ini kerjasama dengan pihak Komisi III juga tentang bagaimana yang benar dan bagaimana yang seharusnya. Dari PKB Pak Anwar Rahman yang tadi itu saya katakan Pak bukan karena kami tidak mau kontan Pak, tapi daripada ngga sama sekali baik kita terima kita setorkan, bukan berarti kita ria untuk mengumbar, selama ini kejaksaan selalu kerja dalam senyap Pak. Tidak pernah kita berusaha untuk mencari muka dan sebagainya yang penting kita kerja dan ini akhirnya yang terjadi. Waktu saya bandingin waktu itu waktu Tol Jorr S itu lebih besar 1,3 triliun tapi mungkin tidak ada yang tahu karena melalui transfer, bukan uang tunai. Dan waktu itu dilakukan di Bank pemerintah juga di Mandiri, untuk yang ini untuk yang Samadikun Hartono. Ini bukan hanya itu Pak anu Pak Desmon saya ingin laporkan juga tentang Soejono Timan, Yu Jin. Jadi waktu itu ada satu keanehan memang dimana yang bersangkutan dalam putusan sebelumnya dinyatakan bersalah, bahkan sudah inkrah, kemudian yang bersangkutan mengajukan PK, di PK dibebaskan. Sementara uang yang semula dijadikan barang bukti sebesar 55 milyar sudah terlanjut disetor ke kas negara. Ini kan ... harus kembalikan. Jadi waktu itu sempat saya ajak bicara yang bersangkutan, bahwa saya lihat putusannya putusan PK-nya ini anda bukan dinyatakan fresfrat tapi on slash, terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana. Berarti kerugian negara masih ada. Kalau anda akan menuntut uang ini kembali saya juga akan menuntut perdata anda untuk membayar ganti kerugian, dan mungkin jumlahnya lebih besar. Nah akhirnya dengan apa yang kita sampaikan itu dia secara sukarela membuat pernyataan untuk tidak mempermasalahakan lagi uang itu dan menjadi sepenuhnya milik negara. Ini syukur *Alkhamdulillah*, ini setidaknya ada 55 milyar uang yang mestinya kita kembalikan kemudian bisa kita selamatkan. Dari PKS Pak Nasir Jamil tadi agak lupa partainya itu. Itulah kenyataannya Pak Nasir bahwa kami jangankan satu digitpun dikurangi, dari sembilan hanya tinggal enam. Sementara memang kamipun tidak pernah akan mau bandingkan dengan instansi lain termasuk Polri. Ya meskipun tentunya kami berada dalam satu *criminal justice sistem* yang sama. Kalaupun nanti suatu saat kita mendapatkan dua puluh T ya *Alkhamdulillah* betul Pak itu, luar biasa itu. Tentang masalah anggaran ini kami membahasnya ini melalui trilateral meeting Pak seperti yang saya jelaskan tadi awalnya kita rumuskan kita rencanakan kita anggarkan, kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan dan setelah itu tentunya kami diajak untuk berbicara tiga pihak antara Menteri Keuangan, Kementerian Bappenas dan Kejaksaan sendiri kita sampaikan disana bahwa yang kita ajukan itu sebetulnya rincian yang ada, dan dalam naskah kami ini ada Pak sebetulnya, program-program apa yang sedang kami rencanakan akan kami lakukan. Gedung kantor itulah menjadi harapan kami, tentunya lebih cepat lebih baik Pak. Hanya persoalannya kita juga menyadari pemerintah masih dalam kondisi sulit financial memang saya rasa sehingga akhirnya diputuskan untuk moratorium. Ya bersyukur untuk mereka justru pemerintah daerahnya yang kebetulan surplus yang mempunyai kemampuan financial yang kuat memberikan bantuan pada kita. Contohnya tadi dua Pak Badung dan Tangsel mereka memberikan bantuan untuk

membangun gedung pada kita. Dan jumlahnya besar Pak, seperti Badung itu mbangun gedung kantor kita berikut isinya itu sampai 35 milyar, dan sangat bagus Pak anu Pak Kahar kalau suatu saat mungkin ke Bali bisa mampir kesana. Saya sendiri merasa bangga dengan kantor itu. Pak Arsul Sani dari PPP ini minta penjelasan mengenai dua indikator tadi, turunnya anggaran kejaksaan karena kemampuan fiskal pemerintah atau karena kemampuan penyerapan anggaran. Saya sulit untuk menjawab ini Pak, tapi yang pasti memang kami pernah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Menteri Keuangan tentang pengelolaan anggaran. Ini berarti bahwa tentunya dalam hal pengelolaan anggaran kami dinilai cukup baik. Jadi saya pikir mungkin Pak Arsul bisa menyimpulkan sendiri. Kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan tentang pengelolaan anggaran. Kami berhasil mengelola anggaran kami sebesar 95 persen, dan yang selebihnya tentunya karena penghematan-penghematan. Dari Nasdem Pak Taufiqulhadi terima kasih atas dukungannya, dan ini yang kami harapkan. Tapi bukan hanya dari Nasdem yang mendukung tapi dari fraksi lain. Jadi kalau Nasdem ngga mendukung keterlaluannya Pak ya. Dari Hanura Pak Sudding terima kasih juga Pak. Jadi penguatan kejaksaan memang sebenarnya bukan semata-mata dari anggaran tapi juga dari kewenangan sebetulnya yang kami harapkan. Itulah makanya seringkali saya katakan agak kurang fair kalau membandingkan kinerja kejaksaan dan KPK misalnya karena kewenangannya berbeda, bukan hanya anggarannya berbeda kewenangannya berbeda, fasilitasnya berbeda. Tapi kami nyatanya bisa lebih banyak menangani kasus daripada mereka. Itu yang dapat kami sampaikan disini.

Itu kira-kira Pak Pimpinan Rapat Kerja yang saya hormati dan saya banggakan hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi kami sangat berharap kiranya dukungan dari Komisi III tidak akan putus-putusnya demi upaya memperbaiki perbaikan-perbaikan daripada lembaga kejaksaan yang kita cintai berasma.

Terima kasih *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan *Ohm Santi Santi Santi Ohm*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jaksa Agung. Tahapan selanjutnya kami persilakan tayangkan kesimpulan sementara, kenapa sementara kan ini belum final, *temporary compendition*.

Saya bacakan ya, tolong rancangan kesimpulan sementara ya jangan kesimpulan nanti dianggap baku itu, semmentaranya kurang. Rancangan kesimpulan sementara. Nah nanti rancangannya dihilangin kalau sudah final ya. Saya baca, Komisi III DPR RI dapat memahami penjelasan Jaksa Agung atas pagu indikatif 2019 yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 6,1 beserta usulan tambahan sebesar 3 triliun. Untuk selanjutnya Komisi III DPR RI meminta kejaksaan, agung ya, untuk menyajikan rencana program kerja yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam rapat kerja. Selanjutnya Komisi III DPR RI akan mempelajari secara teliti pagu usulan Kejaksaan Agung sebesar 9,7 dan akan diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi III sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Ada yang koreksi Bapak Ibu Anggota?. Pak Soenmanjaya?

F-PKS (H. TB. SOENMANJAYA):

Itu selanjutnya pada baris satu, dua, tiga ya ke enam ya itu. Rapat kerja titik Pak, rapat kerja titik, nah iya selanjutnya itu bisa dibuat alinea ke dua atau bisa lanjut. Saya kira baik diturunkan saja Pak, diturunkan saja, ya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ada dua usulan?

F-PKS (H. TB. SOENMANJAYA):

Satu rangkaian itu Pak, satu rangkaian.

KETUA RAPAT:

Oke mungkin Pak Pras.

JAKSA AGUNG RI (DRS.HM.PRASETYO):

Ya, ini mengenai masalah kalimat istilah saja. Ini yang diusulkan itu mungkin kalau diizinkan diganti dengan disampaikan, disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar sekian, serta usulan tambahan yang diajukan oleh kejaksaan sebesar sekian. Itu disampaikan oleh Menteri Keuangan sebesar sekian, dan usulan yang disampaikan, usulan tambahan yang disampaikan oleh yang diajukan oleh kejaksaan sebesar sekian.

Itu saja Pak Ketua.

F-PKS (H. TB. SOENMANJAYA):

Yang ke dua ketua sedikit. Ini Undang-Undang Nomor 17 sudah dua kali mengalami perubahan. Jadi mohon sekretariat mencermati Undang-Undang Nomor 17 itu. Sekarang menjadi Nomor 2 Tahun 2018. Jadi 17 menjadi 42, sekarang menjadi Nomor 2 Tahun 2018. Sebelum Tatib itu.

KETUA RAPAT:

Tahunnya saja itu tahunnya dirubah, nomor

F-PKS (H. TB. SOENMANJAYA):

Ya perubahanlah ya, undang-undang perubahan. Itu sudah betul, terus telah diubah

KETUA RAPAT:

Dua ribu empat belas selanjutnya, setelah diubah.

F-PKS (H. TB. SOENMANJAYA)

Jadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018. Dan MD3 itu bukan keterangan baku ya, undang-undangnya bukan MD3 namanya, nah itu diganti saja, dipanjangkan, dia tidak baku.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti dibenerin saja. MD3 saja.

Oke, ngga ada yang prinsip ya, Bapak Ibu setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Pak Jaksa Agung?

JAKSA AGUNG RI (DRS.HM.PRASETYO):

Setuju Pak.

(KETOK PALU SATU KALI)

KETUA RAPAT:

Dengan demikian rapat hari ini cukup sampai disini, atas perhatian Bapak Ibu Anggota Komisi III dan kepada Pak Jaksa Agung saya selaku Pimpinan rapat hari ini mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja dibidang anggaran hari ini. Saya tutup, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(KETOK PALU TIGA KALI)

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB.